E-ISSN : 3025-1311
https://ejournal.warunayama.org/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 11 No 1 Tahun 2026

ANALISIS DASHBOARD SUMSEL UNTUK TATA KELOLA DATA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lili Sukma Melati[1], Rizki Faruli[2], Ani Rusnani[3], Dhea Seni Permata[4], Naisya Marcella Tri Putri[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Raden Fatah
[1]lilisukmamelati@gmail.com, [2]rizkyfarully@gmail.com, [3]aniirusnaini@gmail.com, [4]dheapermata3702@gmail.com, [5]naisahmarcella@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan tata kelola data yang lebih terintegrasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Sebagai implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan Dashboard Sumsel sebagai media integrasi, visualisasi, dan publikasi data pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dashboard Sumsel dalam mendukung tata kelola data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai Walidata Daerah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dashboard Sumsel telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kemudahan akses data, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi informasi publik, serta mendorong efisiensi pengelolaan data pemerintah daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian format data, inkonsistensi metadata, keterlambatan pembaruan data, fragmentasi sistem informasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek teknis maupun nonteknis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Kata kunci: Satu Data Indonesia, Dashboard Sumsel, tata kelola data, interoperabilitas data, pemerintah daerah.

Article History
Received: June 2026
Reviewed: June 2026
Published: June 2026

Plagiarism Checker No.: 237.u873247.fh8374

Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstract

The development of information technology has encouraged governments to implement more integrated data governance through the One Data Indonesia policy. As part of the policy implementation at the regional level, the Government of South Sumatra Province developed Dashboard Sumsel as a platform for integrating, visualizing, and publishing regional development data. This study aims to analyze the implementation of Dashboard Sumsel in supporting data governance within the Government of South Sumatra Province and to evaluate the application of One Data Indonesia principles, including data standards, metadata, data interoperability, and reference codes. This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation conducted at the Department of Communication and Informatics of South Sumatra Province as the Regional Data Guardian. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Dashboard Sumsel has contributed to improving data accessibility, supporting evidence-based decision making, enhancing public information transparency, and increasing efficiency in regional government data management. However, its implementation still faces several challenges, including inconsistencies in data formats, metadata discrepancies, delays in data updates, fragmented information systems among institutions, and limitations in human resources and supporting infrastructure. Therefore, strengthening both technical and non-technical aspects is necessary to improve the effectiveness of One Data Indonesia implementation at the regional level.

Keywords: *One Data Indonesia, Dashboard Sumsel, data governance, data interoperability, regional government.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data tidak lagi dipandang hanya sebagai produk administratif, tetapi telah menjadi aset strategis yang berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan publik. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses menjadi faktor utama dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia [1]. Kebijakan ini bertujuan menciptakan data yang berkualitas melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi duplikasi

data, meningkatkan konsistensi informasi antarinstansi, serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data pemerintahan.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan payung hukum daerah [2] dan mengembangkan Dashboard Sumsel yang dapat diakses melalui www.dashboard.sumselprov.go.id [3]. *Dashboard* ini berfungsi sebagai media integrasi, visualisasi, *monitoring*, dan publikasi data pembangunan daerah yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

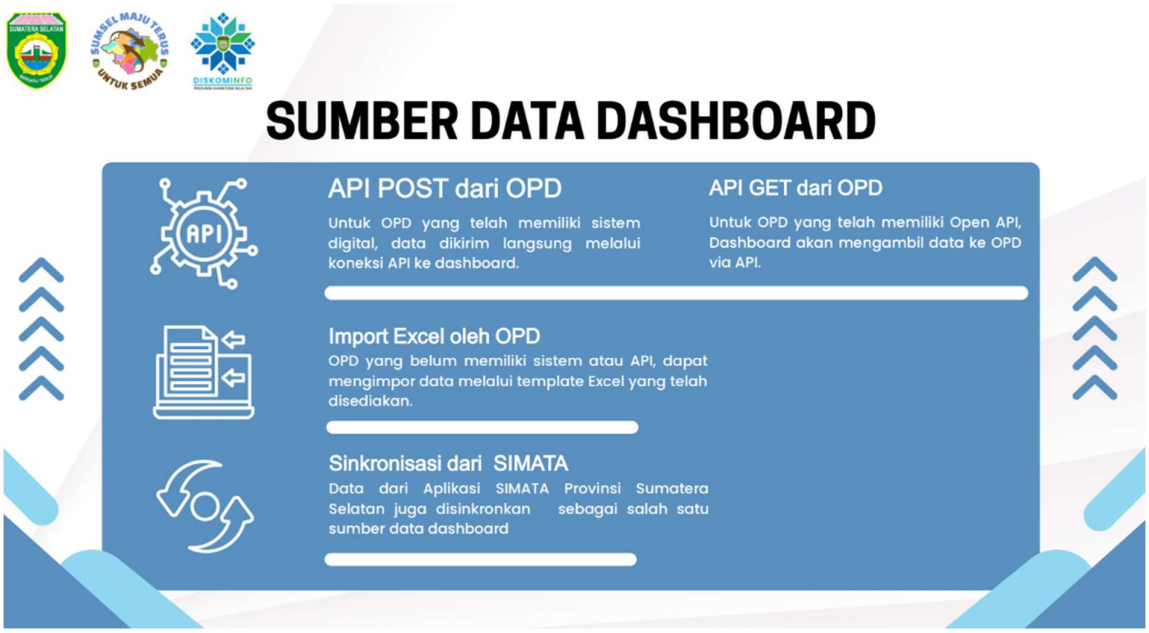

Gambar 1. Sumber Data *Dashboard*

Dalam pelaksanaannya, Dashboard Sumsel terintegrasi dengan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Data) dan mengakomodasi berbagai metode pengumpulan data dari OPD [3]. Berdasarkan mekanisme yang diterapkan, terdapat tiga sumber utama data yang digunakan dalam *dashboard*, yaitu integrasi melalui API POST dan API GET bagi OPD yang telah memiliki sistem informasi digital, mekanisme impor data menggunakan *template* Excel bagi OPD yang belum memiliki sistem terintegrasi, serta sinkronisasi data melalui aplikasi SIMATA sebagai pusat konsolidasi data daerah. Penerapan arsitektur data hibrida ini memungkinkan seluruh OPD tetap dapat berpartisipasi dalam ekosistem Satu Data Sumatera Selatan sesuai tingkat kematangan digital masing-masing.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi Dashboard Sumsel tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola data yang diterapkan oleh setiap OPD. Masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaksesuaian format data, kelengkapan metadata yang belum optimal, keterlambatan pembaruan data, serta perbedaan tingkat pemahaman mengenai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas data yang ditampilkan dalam *dashboard* dan efektivitas pemanfaatannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan data, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wali Data Daerah menyelenggarakan Program Giat Magang Berdampak Satu Data [4]. Program ini melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pendampingan OPD, validasi data, pengelolaan metadata, literasi data, serta asistensi teknis penginputan data ke sistem. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat membantu

mempercepat implementasi prinsip-prinsip tata kelola data sekaligus meningkatkan kualitas data yang tersaji pada Dashboard Sumsel.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi Dashboard Sumsel dalam mendukung tata kelola data pemerintah daerah pada Program Satu Data Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas *dashboard* dalam mendukung pengelolaan data, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap penyediaan informasi yang berkualitas bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi Dashboard Sumsel dalam mendukung tata kelola data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas data pada Dashboard Sumsel, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat mendukung penyediaan informasi yang akurat dan terpadu bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dashboard Sumsel dalam mendukung tata kelola data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Program Satu Data Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, khususnya standar data, metadata, dan interoperabilitas data pada Dashboard Sumsel, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan integrasi data guna mendukung penyediaan informasi yang berkualitas bagi pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Transformasi digital dalam ranah tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah kebutuhan strategis demi mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah standardisasi ini memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), sebuah payung regulasi yang berfokus pada integrasi serta kemampuan sistem untuk saling terhubung atau interoperabilitas data antar-instansi [5]. Semangat ini berjalan selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mulai meninggalkan pola-pola konvensional dan beralih ke tata kelola berbasis digital [6]. Pada akhirnya, keterpaduan kebijakan ini menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mampu menyajikan data yang mutakhir dan mudah diakses, serta memiliki akurasi tinggi yang bersumber langsung dari otoritas resmi yang [7].

2.2 Inisiatif *Smart Province* dan Integrasi Layanan Daerah

Pengembangan konsep daerah cerdas di tingkat provinsi atau *Smart Province* sejatinya mengemban misi besar untuk menyatukan berbagai basis data serta mengoordinasikan layanan elektronik yang tersebar di wilayah kabupaten dan kota [6]. Peran pemerintah provinsi di sini sangat krusial sebagai jembatan sekaligus integrator utama yang memastikan seluruh elemen birokrasi di bawahnya dapat saling berkolaborasi dalam satu ekosistem digital yang padu [6]. Wujud nyata dari upaya integrasi ini dapat dilihat dari lahirnya platform terpadu seperti Dashboard Sumsel atau inisiatif Satu Data Satu Digital Sumsel [7]. Melalui platform berbasis web ini, berbagai data sektoral dari beragam lini pelayanan publik dirangkum ke dalam satu pintu akses informasi [5]. Kehadiran ruang digital bersama ini terbukti mampu menekan risiko

terjadinya tumpang tindih data, mengurangi potensi kesalahan manusia akibat proses input manual yang terpisah, serta mempercepat proses penyusunan laporan berkala yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah [7].

2.3 Tantangan dan Hambatan Penerapan Kesiapan Teknologi di Tingkat Lokal

Kendati regulasi sudah mapan dan infrastruktur teknologi sering kali dinilai telah siap, dinamika adopsi teknologi (*e-readiness*) di lapangan masih kerap membentur realitas operasional yang kompleks [6]. Beberapa kajian memperlihatkan adanya ketimpangan nyata di mana kesiapan aspek teknologi dan tata kelola pemerintahan sudah berada pada jalur yang tepat, namun dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) kerap menjadi titik lemah akibat terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur di bidang teknologi informasi [6]. Hambatan di tingkat tapak ini semakin diperumit oleh faktor teknis lainnya, mulai dari ketergantungan yang amat tinggi terhadap stabilitas jaringan internet di daerah [5]. Selain masalah koneksi, belum optimalnya sistem validasi otomatis juga memicu kendala tersendiri karena memaksa para operator daerah melakukan kerja ganda atau pengecekan ulang secara manual [7]. Kondisi tersebut diperparah oleh variasi struktur data yang berbeda antar-instansi, sehingga proses sinkronisasi pangkalan data secara langsung atau *real-time* masih sulit diwujudkan sepenuhnya [6].

2.4 Pemanfaatan *Information Dashboard* untuk Pengambilan Keputusan Sektoral

Di tengah melimpahnya arus informasi, visualisasi data melalui media *dashboard* memegang peran penting dalam menyederhanakan data mentah yang rumit menjadi sajian visual yang mudah dicerna oleh para pengambil kebijakan [7]. Manfaat praktis ini terlihat jelas pada sektor kesehatan, di mana visualisasi data sangat membantu dalam memantau kapasitas pelayanan rawat inap seperti ketersediaan tempat tidur pasien dan pemetaan distribusi tenaga medis secara aktual [7]. Pada rumpun yang berbeda seperti sektor pemuda dan olahraga, sistem serupa mampu mempercepat rekapitulasi data demografi kepemudaan hingga pelacakan rekam jejak prestasi atlet dari level daerah hingga panggung internasional [5]. Melalui penyajian informasi yang lebih tertata dan hidup pada sebuah *dashboard*, proses pemantauan dan evaluasi program kerja dapat berjalan lebih responsif guna mendukung terciptanya kebijakan daerah yang berbasis pada data riil (*data-driven decision making*) [5].

2.5 Kerangka Konseptual

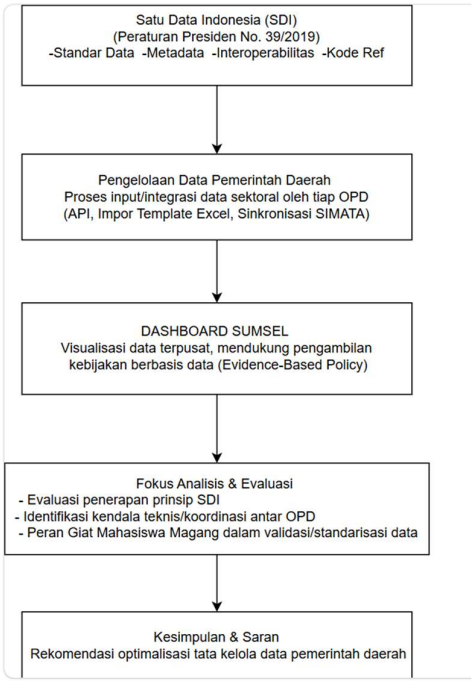

Gambar 2. Diagram Alur Kerangka Konseptual Penelitian

1) Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019): Menjadi landasan normatif tata kelola data pemerintah yang bertumpu pada 4 prinsip utama: Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi.
2) Pengelolaan Data Pemerintah Daerah: Proses pengumpulan, integrasi, dan pembaruan data sektoral yang secara teknis dan administratif dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dikoordinasikan oleh Walidata (Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan) melalui integrasi hibrida (SIMATA/API/Excel).
3) Dashboard Sumsel: Platform visualisasi data terpusat yang menyajikan data dari berbagai OPD, ditujukan untuk mendukung *evidence-based policy* dan perwujudan keterbukaan informasi publik.
4) Fokus Analisis Implementasi: Mengevaluasi sejauh mana *dashboard* tersebut berhasil memenuhi prinsip Satu Data, serta mengidentifikasi faktor pendorong maupun kendala di lapangan (kualitas data, sumber daya, dan koordinasi), termasuk peran serta program mahasiswa magang.
5) Kesimpulan dan Saran: Rekomendasi optimalisasi tata kelola data pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Dashboard Sumsel dalam mendukung tata kelola data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Program Satu Data Sumatera Selatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan proses pengelolaan data, penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi aktual implementasi Dashboard Sumsel berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan metode ini sejalan dengan penelitian Nuryana dan Junaidi (2025), Rosalinda (2025), serta Syazili et al. (2026) yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan, pengelolaan data, dan sistem informasi pemerintahan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai Walidata Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan Dashboard Sumsel. Lokasi penelitian dipilih karena Dashboard Sumsel merupakan salah satu media integrasi, visualisasi, dan publikasi data pembangunan daerah yang digunakan untuk mendukung implementasi Program Satu Data Sumatera Selatan.

Selain itu, Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam pengelolaan data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), koordinasi penyelenggaraan Satu Data, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik [6].

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan Dashboard Sumsel, proses pengelolaan data, mekanisme integrasi data dari OPD, proses validasi data, serta penyajian informasi dalam bentuk *dashboard*. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana Dashboard Sumsel digunakan sebagai sarana *monitoring*, visualisasi, dan publikasi data pembangunan daerah [7].

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dashboard Sumsel, antara lain administrator sistem, pengelola data pada Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, serta perwakilan OPD sebagai produsen data.

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi Dashboard Sumsel, penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, manfaat *dashboard* dalam mendukung tata kelola data, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses integrasi dan pengelolaan data. Wawancara mendalam untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan sistem informasi pemerintahan [6].

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan Dashboard Sumsel dan Program Satu Data Sumatera Selatan, seperti laporan kegiatan, pedoman pengelolaan data, dokumen metadata, standar data, peraturan terkait Satu Data Indonesia, serta dokumentasi penggunaan Dashboard Sumsel.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan [8].

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang berkaitan dengan implementasi Dashboard Sumsel, tata kelola data, standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kendala dalam pengelolaan data akan dipilah dan disusun sesuai kebutuhan penelitian.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, maupun gambar yang memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data yang ditemukan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan implementasi Dashboard Sumsel dalam mendukung tata kelola data pemerintah daerah.

Penyajian data juga digunakan untuk menampilkan hasil analisis mengenai penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, mekanisme integrasi data melalui API, penggunaan SIMATA sebagai pusat konsolidasi data, serta peran Dashboard Sumsel dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data [6].

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap temuan penelitian mengenai efektivitas implementasi Dashboard Sumsel, manfaat yang dihasilkan, tingkat penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan integrasi data.

Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan mewujudkan komitmen nya terhadap kebijakan Satu data Indonesia (SDI) dan *Open Government Data* (OGD) melalui Dashboard Sumsel yang berfungsi untuk memudahkan pencarian data statistik yang akurat bagi kalangan masyarakat umum dan pemerintah. Tujuan utama dari implementasi Dashboard Sumsel adalah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, sehingga dapat menjadi landasan dalam perencanaan Pembangunan dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Dashboard Sumsel memiliki fitur utama yang mencakup modul entri data secara manual, fitur impor data melalui *spreadsheet* (Excel), modul pengelolaan data sektoral serta visualisasi data dalam bentuk grafik dan tabel. *Dashboard* ini terdiri dari empat pengguna yang memiliki peran berbeda, yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas untuk mengumpulkan data, Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas memeriksa dan menyebarluaskan data, Badan Pusat Statistik yang memberikan bimbingan teknis, serta masyarakat luas yang menggunakan data sebagai informasi publik.

Proses Implementasi Dashboard Sumsel mengacu pada tahapan tata kelola data yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021. Organisasi perangkat daerah (OPD) mengumpulkan data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati melalui Forum Satu Data, baik melalui penginputan manual pada *form* tambah data maupun pengunggahan dokumen *spreadsheet* yang telah divalidasi oleh masing-masing instansi. Proses integrasi melibatkan berbagai OPD lintas sektor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi ini masih menghadapi tantangan yang signifikan karena banyaknya sistem informasi yang dimiliki masing-masing instansi, sehingga penyatuan data ke dalam satu platform tunggal belum berjalan secara optimal. Setelah melalui proses verifikasi oleh Diskominfo, data tersebut kemudian disajikan dalam Dashboard Sumsel melalui visualisasi grafis, mencakup rekapitulasi data statistik sektoral yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu.

Kesesuaian Implementasi dengan Prinsip Satu Data Indonesia

1. Dashboard Sumsel diselenggarakan dengan meninjau empat prinsip utama Satu Data Indonesia (SDI) yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi.
2. Dari aspek standar data, secara kebijakan standar telah ditetapkan. Namun adanya tumpang tindih data antar OPD masih terjadi karena proses pengumpulan data belum mengacu pada standar tunggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi standar data belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan teknis di tingkat pelaksana, sehingga diperlukan penguatan pengawasan maupun sosialisasi standar agar implementasi lebih konsisten.
3. Pada aspek metadata, kewajiban penyertaan metadata pada setiap data yang dikelola telah ditetapkan untuk memfasilitasi administrasi dan pemanfaatan data. Akan tetapi, format metadata antarinstansi belum konsisten, yang berpotensi menimbulkan perbedaan informasi ketika data digunakan lintas sektor. Regulasi metadata sudah diatur, tetapi belum disertai panduan teknis yang lebih rinci, sehingga format metadata yang dihasilkan setiap OPD masih belum konsisten.
4. Dari aspek interoperabilitas data, *dashboard* secara desain telah dirancang agar data dapat dibagipakaikan dalam format yang dapat digunakan kembali (*reusable*). Namun demikian, keterbatasan teknis serta banyaknya aplikasi yang terpisah-pisah di berbagai instansi masih menjadi hambatan dalam mencapai interoperabilitas yang ideal. Temuan ini memperkuat gambaran pada bagian implementasi sebelumnya, di mana sistem informasi yang terpisah-pisah menjadi masalah yang terus berulang di berbagai aspek tata kelola data.

5. Sementara itu, pada aspek kode referensi, penggunaan kode referensi dan data induk yang seragam dimaksudkan untuk memastikan data dapat diintegrasikan secara akurat antarinstansi maupun antartingkat pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap keempat prinsip Satu Data Indonesia menunjukkan pola yang konsisten yakni kerangka kebijakan dan regulasi pada tingkat provinsi sudah cukup memadai, tetapi implementasi teknis di tingkat OPD masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi keseragaman format, kelengkapan metadata, kesiapan infrastruktur, maupun sinkronisasi kode referensi. Kesenjangan antara regulasi dan praktik ini menjadi salah satu temuan yang menjelaskan mengapa proses tata kelola data satu pintu belum dapat berjalan secara optimal.

Manfaat Implementasi Dashboard Sumsel

Implementasi Dashboard Sumsel memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintah daerah. Dashboard Sumsel memberikan kemudahan akses data karena masyarakat dan pemerintah dapat mencari data statistik sektoral melalui satu pintu akses internet tanpa harus mencari di masing-masing instansi. Data yang tersedia disajikan secara visual dan terstruktur turut mendukung dalam pengambilan keputusan, khususnya bagi Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis fakta di lapangan. Keberadaan data yang terbuka dan mudah diakses bagi publik turut berkontribusi dalam peningkatan transparansi informasi, sehingga mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah dan memberikan kepada masyarakat akses terhadap informasi yang lebih dapat dipercaya. Digitalisasi pengelolaan data turut meningkatkan efisiensi kinerja terutama dalam proses pengolahan dan penyusunan laporan rutin di tingkat OPD. Kehadiran Dashboard Sumsel memberikan nilai tambah yang dapat dirasakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi keberhasilan dari implementasi Dashboard Sumsel yaitu, terdapat beberapa instansi yang masih belum mengunggah ataupun memperbarui data sektoralnya secara menyeluruh, sehingga cakupan data dalam *dashboard* belum sepenuhnya lengkap. Kemudian ditemukan keterlambatan berupa pembaruan data (*data lag*) yang disebabkan rendahnya kesadaran sebagian instansi untuk memperbarui informasinya secara rutin, sehingga data yang disajikan dalam portal berisiko menjadi tidak mutakhir. Minimnya sumber daya manusia dengan latar belakang analisis data dan statistik, ditambah dengan fasilitas pendukung seperti perangkat komputer yang belum mendapat pembaruan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbagai kendala tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan utama implementasi Dashboard Sumsel tidak hanya bersifat teknis-infrastruktural, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia, serta tata Kelola kelembagaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dashboard Sumsel berfungsi sebagai wujud dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan, berupa landasan regulasi, pembagian peran pengguna data, serta fitur-fitur dasar yang relevan dengan kebutuhan data sektoral. Dashboard Sumsel memberikan manfaat berupa kemudahan akses data, dukungan pengambilan keputusan, transparansi informasi dan efisiensi kerja. Dengan itu, Dashboard Sumsel telah memenuhi tujuan dasarnya sebagai wujud implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi. Namun demikian, terdapat ketimpangan antara kebijakan dengan praktik di lapangan yang tercermin pada keempat prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data (keseragaman format data), metadata (informasi yang menjelaskan suatu data), interoperabilitas (kemampuan sistem untuk berbagi data), dan kode referensi (kode baku yang menjadi acuan), di mana keempatnya bermuara pada akar masalah yang sama: fragmentasi sistem informasi dan keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, optimalisasi sistem Dashboard Sumsel di masa depan perlu penguatan pada kedua sisi sekaligus, yakni penyempurnaan pada aspek teknis seperti standardisasi format data dan integrasi sistem guna mengatasi fragmentasi sistem informasi, serta penguatan aspek

non-teknis seperti penyusunan dokumen SOP, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan penguatan komitmen koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah melalui Forum Satu Data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Dashboard Sumsel menunjukkan upaya nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung penerapan kebijakan Satu Data Indonesia melalui penyediaan sistem yang mampu mengintegrasikan, mengelola, dan menyajikan data pembangunan daerah secara lebih terpusat. Kehadiran Dashboard Sumsel memberikan manfaat yang cukup signifikan, terutama dalam mempermudah akses data, mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi informasi publik, serta mendorong efisiensi kerja dalam pengelolaan data pemerintahan.

Meskipun demikian, penerapan Dashboard Sumsel masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain belum seragamnya format data antarinstansi, belum optimalnya penerapan metadata, keterlambatan pembaruan data, fragmentasi sistem informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan komitmen kelembagaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional yang lebih terstruktur, peningkatan integrasi sistem, serta penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan langkah tersebut, implementasi Dashboard Sumsel diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung tata kelola data pemerintah daerah yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

REFERENSI

[1] *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. (2019). Jakarta: Sekretariat Negara.
[2] *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan*. (2021). Palembang: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
[3] Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. (2024*). Buku Panduan Teknis Aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Data) dan Dashboard Sumsel*. Palembang: Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.
[4] Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Panduan Pelaksanaan Giat Magang Berdampak Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.
[5] Adriyansa, A., & Muzakir, A. (2025). "Analisis sistem informasi pengelolaan data atlet sebagai bagian dari implementasi program Satu Data Sumsel di Dinas Pemuda dan Olahraga". *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1036–1046. https://doi.org/10.63822/w10nwr03
[6] Damanik, M. P. (2019). "Sumsel Smart Province: Implementasi dan tantangan kesiapan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23(2), 195–212.
[7] Syazili, A., Sandro, N. A., & Effendy, I. (2026). "Pengelolaan data ketersediaan kamar pasien dan ketenagakerjaan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar melalui Dashboard Sumsel". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(11), 6414–6420. https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

[8] Rosalinda. (2025). “Tinjauan umum mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan”. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 23–28.